PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN
SMA INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL
BAITUL MANSHURIN MALANG

TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR: 7.8.128/UN32.1/KS/2026
NOMOR:

Pada hari ini, Senin tanggal 4 Mei tahun 2026 bertempat di Kota Malang, Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Nanang Saiful Arif, S.Pd., Kepala SMA International Islamic Boarding School Baitul Manshurin Malang,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA International Islamic Boarding School Baitul Manshurin Malang, berkedudukan di Jalan Kapi Minda VII Blok 11F No. 45 Mangliawan, Pakis, Kab. Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan pendidikan menengah atas swasta berbasis pondok pesantren di bidang pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan Baitul Manshurin Malang;
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara SMA International Islamic Boarding School Baitul Manshurin Malang dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 7.8.128/UN32.1/KS/2026 dan Nomor (…) tentang Kerja sama Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama tentang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026 (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja sama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerja sama** ini yang dimaksud dengan:
(1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
(2) Bidang Penelitian;
(3) Bidang pengabdian kepada Masyarakat;
(4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026 secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja sama** ini mencakup:
(1) Pengabdian kepada Masyarakat
   a) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
   b) Kerja sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
(2) Departemen Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Pengembangan Program Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
   a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**;
   b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
   a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
   b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
   c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak Kesatu 
Paraf Pihak Kedua 

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
   a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
   b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
   a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
   b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**;
   c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerja sama** ini adalah selama enam bulan, sejak 4 Mei sampai dengan 30 November 2026 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026 ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

(1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
(2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
(4) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
   a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.
   b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026 kepada **PIHAK KEDUA**;
(3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026 kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf Pihak Kesatu 
Paraf Pihak Kedua 

(4) **PIHAK KESATU** menawarkan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026 kepada **PIHAK KEDUA**;
(5) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026 kepada **PIHAK KESATU**;
(6) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan konsep RAB kepada masing-masing **PIHAK**;
(7) Masing-masing **PIHAK** melakukan verifikasi konsep RAB dari masing-masing **PIHAK**;
(8) Masing-masing **PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
(9) Masing-masing **PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
(10) Masing-masing **PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026 berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
(11) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026 berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026;
(12) Masing-masing **PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026 diterima;
(13) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan masing-masing **PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh masing-masing **PIHAK**;
(14) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026 kepada masing-masing **PIHAK**;
(15) Masing-masing **PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2026; dan
(16) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (9) ditujukan kepada:
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur.

(2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Paraf Pihak Kesatu 
Paraf Pihak Kedua 

Kepala SMA International Islamic Boarding School Baitul Manshurin Malang
Jalan Kapi Minda VII Blok 11F No. 45 Mangliawan, Pakis, Kab. Malang, Jawa Timur

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerja sama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerja sama** ini.
(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerja sama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja sama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu 
Paraf Pihak Kedua 

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja sama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja sama** ini.

(2) **Perjanjian Kerja sama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerja sama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan	Kepala
Fakultas Ilmu Pendidikan	SMA International Islamic Boarding
Universitas Negeri Malang	School Baitul Manshurin Malang
Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.	**Nanang Saiful Arif, S.Pd.**
NIP 197304132003121001	.....

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua